



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/54/KEP/413.013/2020

TENTANG

PETUGAS PENGELOLA ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LAMONGAN

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 62 Tahun 2019, maka Petugas Pengelola Arsip sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/309/KEP/413.013/2018 perlu untuk ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka guna meningkatkan tata kelola kearsipan dan terwujudnya tertib arsip di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan, perlu menunjuk Petugas Pengelola Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5286);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 2);
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kearsipan Daerah Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 78);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 62 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 62);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 67);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 68 Tahun 2019 tentang Tata Kearsipan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 68);
17. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyusutan Arsip (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 71).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

- KESATU : Nama-nama Petugas Pengelola Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pengelola Arsip sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugas harus berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/309/KEP/413.013/2018 tentang Petugas Pengelola Arsip Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lamongan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

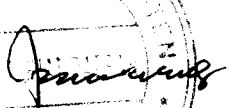
Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten
Lamongan;
5. Sdr. Kepala Dinas Kearsipan Daerah
Kabupaten Lamongan;
6. Sdr. Petugas dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
 NOMOR : 188/54/KEP/413.013/2020
 TANGGAL : 2 JANUARI 2020

NAMA-NAMA PETUGAS PENGELOLA ARSIP DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

NO.	PERANGKAT DAERAH	NAMA PETUGAS PENGELOLA ARSIP
1	2	3
1.	INSPEKTORAT	1. M. HUSAIN NASIRUDDIN 2. MOHAMMAD ANWAR
2.	SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	1. DANIS YUGI. A, S.E. 2. LINDA ASTUTIK, S.Pd.
3.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH	1. ANINDYA VANINDITA, S.IIP. 2. CATUR SUBAGIO
4.	BADAN PENDAPATAN DAERAH	1. ARIFUL MAS'AN 2. ENY PRASTIAWATI
5.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1. YULYA AGUSTIN PUSPITASARI 2. YOGA MAULANA PUTRA
6.	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	1. FAIQOTUL ULA PUTRI DELVIYAH 2. TRIO DAVID CANIAGO
7.	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	ADITYA PUTRA PRATAMA M, S.Kom.
8.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	INDAH RAHMAWATI IKA SARI, S.E.
9.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	LILIK MURTOMO, S.Kom.
10.	DINAS PENDIDIKAN	1. DHANY FEBRIYANTO, S.Pd.I., M.Si. 2. YADI
11.	DINAS KESEHATAN	1. SUYANTO 2. FARIDA, S.H.
12.	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA	1. SUDIYANTO 2. SUNANIK
13.	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	1. HARJITO 2. FIRMANSYAH WISNU CAHYA
14.	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1. SULISTYOWATI 2. DWI ANGGER SAGUNTUR
15.	DINAS SOSIAL	HENDRA, S.E.
16.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1. SAMUDI 2. ERNA WAHYUDI
17.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	ADITA WAHYU SETYO N.
18.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	DIANA FEBRI SUSANTI, S.Pd.

1	2	3
19.	DINAS PERHUBUNGAN	1. SUSILOWATI, S.E. 2. YUNIAR ADISTI, S.E.
20.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	HERIANA DWI LASTUTI, S.E.
21.	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	GANANG PRATAMA YUDISTIRA
22.	DINAS PERIKANAN	ACHMAD SUWANDI PRASETYA
23.	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	ACH. EDIN IRMAWAN, S.E.
24.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	NUR MU'JIZATIN, S.Pd.
25.	DINAS TENAGA KERJA	MENIK SUMINI, SE
26.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DIAN WAHYU KURNIAWAN
27.	DINAS KETAHANAN PANGAN	1. BAMBANG SUYANTO, S.Sos. 2. MOCHAMAD ISA ANSORI
28.	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	1. SUGIANTO, S.H. 2. MUH. ALIFUDDIN AGUS P.
29.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	M. NUR HUDA
30.	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH	ALVIRA LIA ALAMANDA
31.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1. RUSLAN 2. SUGIANTO
32.	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	HARTATI, S.Sos.
33.	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	M. DIO WAHYUDI, S.E.
34.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOEGIRI	SRI HARTINI, S.Sos.
35.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NGIMBANG	ACH. TEGUH ARDIANZAH
36.	DINAS KEARSIPAN DAERAH	1. IZZAH KHOLISOTIN, A.Md. 2. SITI MU'ALIFAH, S.M. 3. GANIS NUZUL FEBRIANTI, A.Md. 4. ABDUR ROKHIM, S.E. 5. KHAYATUN NUFUS KAMILA, S.E. 6. RINDA KURNIA NINGRUM, S.Pd. 7. GITA TRI ARTIKA, A.Ma. 8. FITROH NUR ZAKID 9. DHEA AYU WULANDARI, S.M.
37.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	LAIDA ULYA ROSYIDA
38.	BAGIAN SUMBER DAYA ALAM	DONIK SUSRIYATI, S.E.
39.	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	RUDI SUYATNO, S.E.
40.	BAGIAN KERJASAMA	ARYA SIGIT BIMANTORO
41.	BAGIAN HUKUM	DODIK TEGUH BUDIMAN, S.H.

1	2	3
42.	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	AMAMATUL QOYYISAH
43.	BAGIAN PEREKONOMIAN	ANWAR ARIFIN
44.	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	ANIK FAHZUNI, S.E.
45.	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	MACHFUDATUS SA'ADAH, S.E.
46.	BAGIAN UMUM	SUJianto
47.	BAGIAN ORGANISASI	ELVIRA SEPTIN DWI PUSPITASARI
48.	BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	KASMURI
49.	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	DEWI IRMAWANTI
50.	KECAMATAN SUKORAME	PASIYAT
51.	KECAMATAN BLULUK	ABDUL BASITH AZHAM
52.	KECAMATAN MODO	EKO PRASETYO
53.	KECAMATAN NGIMBANG	RATNA IKA PUSPITANINGTYAS
54.	KECAMATAN BABAT	WIDYA GALOH PITALOKA
55.	KECAMATAN KEDUNGPRING	MUSNING, S.E.
56.	KECAMATAN BRONDONG	KUMARJI
57.	KECAMATAN LAREN	CANDRA MALYOGA, S.P.
58.	KECAMATAN SEKARAN	NUR HASANAH, S.E.
59.	KECAMATAN MADURAN	KASTIYAR
60.	KECAMATAN SAMBENG	RAIS
61.	KECAMATAN SUGIO	ZULFAN ADE PRATAMA, S.Kom.
62.	KECAMATAN PUCUK	SUMANTRI
63.	KECAMATAN PACIRAN	SUPRIYADI
64.	KECAMATAN SOLOKURO	KASIYATUN, S.IP.
65.	KECAMATAN MANTUP	ISVINA FAJRINA, S.E.
66.	KECAMATAN SUKODADI	MOH. YUSRIL ATTAMIMI, A.Md.
67.	KECAMATAN KARANGGENENG	UBAIDILLAH ASSHIDDIQI SUGIONO
68.	KECAMATAN KEMBANGBAHU	NUR HIDAYAH
69.	KECAMATAN KALITENGAH	OLGA VITAL XIMENES
70.	KECAMATAN TURI	BAGUS MASITTO PUTRA
71.	KECAMATAN LAMONGAN	YAYUK SETIAWATI, S.H.
72.	KECAMATAN TIKUNG	MOH. KHUSNAN HABIB, S.Kom.

1	2	3
73.	KECAMATAN KARANGBINANGUN	MADELAR
74.	KECAMATAN DEKET	HERRY JUMINTO, S.E.
75.	KECAMATAN GLAGAH	MUSTAIN
76.	KECAMATAN SARIREJO	SUDAR

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001